

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu kebijakan strategis paling mencolok yang dihadirkan pada fase pembukaan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersanding dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan ini bukan hanya sekadar wacana, melainkan inti dari janji-janji kampanye Prabowo saat kontestasi Pilpres 2024, yang langsung diterjemahkan ke dalam aksi konkret sepanjang 100 hari pertama pengabdianya, tepatnya mulai dari tanggal 20 Oktober 2024 hingga 28 Januari 2025. Pengukuhan secara resmi program ini dilakukan pada 6 Januari 2025, memanfaatkan sebanyak 190 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebar secara proporsional di seluruh 26 provinsi di Indonesia. Ambisi jangkauannya luar biasa, yakni meliputi 82,9 juta individu hingga tahun 2029, dengan dukungan finansial awal mencapai Rp71 triliun yang kemudian direvisi naik menjadi Rp100 triliun melalui intervensi Badan Gizi Nasional. Lebih dari itu, inisiatif MBG ini melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan nutrisi esensial, karena sangat selaras dengan visi Asta Cita yang menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia demi mewujudkan impian besar Indonesia Emas 2045. Inisiatif tersebut juga mencerminkan komitmen jangka panjang pemerintah untuk mengintegrasikan kesehatan masyarakat dengan agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Fokus utama MBG tertuju pada kelompok-kelompok paling rentan dalam masyarakat, mencakup anak balita di bawah usia lima tahun, seluruh pelajar mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, para ibu hamil, serta ibu menyusui yang membutuhkan dukungan gizi ekstra. Tujuan pokoknya adalah untuk secara efektif menekan angka stunting yang masih tinggi di 21,6 persen serta masalah gizi buruk yang menyentuh 3,8 persen populasi anak balita, sebagaimana tercatat dalam hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

Pemerintah sendiri telah menyusun target ambisius untuk memangkas angka stunting tersebut menjadi hanya 14 persen pada akhir tahun 2024, meskipun berbagai kendala struktural dan sistemik terus menghantui implementasi di wilayah-wilayah pedesaan maupun daerah terpencil yang aksesnya sulit. Penyelenggaraan program ini bergantung pada sinergi multi-sektor yang

melibatkan pemerintah pusat maupun daerah, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, komunitas petani, peternak, serta nelayan dalam membentuk rantai pasok makanan yang kaya nutrisi dan sepenuhnya sesuai dengan standar ketat dari Kementerian Kesehatan. Pada hari pertama penyelenggaraan, data mencatat jumlah penerima manfaat hanya berkisar antara 570.000 hingga 665.000 orang, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakseragaman distribusi di berbagai wilayah geografis. Peristiwa ini dengan cepat memicu gelombang perhatian dari masyarakat luas, terutama karena magnitudo anggaran yang masif serta potensi dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas jangkauannya.

Dalam konteks nasional yang lebih luas, MBG dirancang secara cermat untuk menciptakan efek pengganda ekonomi melalui penyerapan maksimal produk-produk lokal dari para produsen domestik. Hal ini tidak hanya diharapkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga mendorong percepatan kemajuan ekonomi di tingkat pedesaan yang selama ini sering terpinggirkan. Laporan resmi dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tahun 2025 secara eksplisit menyebutkan bahwa hingga bulan September 2025, program ini telah berhasil menjangkau sebanyak 30 juta penerima manfaat secara kumulatif dan secara langsung membuka peluang kerja baru sebanyak 1,5 juta posisi di sektor pengolahan dan distribusi pangan. Walaupun demikian, masa awal pelaksanaan tidak luput dari berbagai kendala, seperti insiden keracunan makanan ringan yang hanya mencapai 0,00017 persen dari total kasus serta praktik penyimpangan dalam distribusi beras yang segera ditangani dengan tindakan tegas berupa pencabutan izin operasional bagi para pelanggar.

Suara-suara kritis dari para legislator Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun para ahli akademis dari Universitas Gadjah Mada (UGM) secara konsisten menyoroti kekurangan persiapan infrastruktur dan koordinasi yang matang di tingkat pemerintahan lokal. Namun, di tengah segala tantangan tersebut, MBG tetap berdiri sebagai simbol kuat dari tekad pemerintahan baru untuk memutus rantai ketidakadilan gizi yang telah lama melekat dan menghambat perkembangan generasi-generasi sebelumnya di Indonesia. Program ini juga menjadi ujian pertama bagi kredibilitas kabinet dalam menangani isu-isu struktural yang mendesak. Selain itu, keberhasilan awal MBG dapat menjadi fondasi bagi kebijakan lanjutan di tahun-tahun mendatang.

MBG tidak hanya dilihat sebagai solusi jangka pendek untuk masalah gizi, tetapi juga sebagai investasi strategis jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif. Dengan memastikan asupan nutrisi yang seimbang sejak usia dini, program ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga optimal dalam perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Integrasi dengan program-program pendidikan nasional semakin memperkuat posisinya sebagai pilar utama Asta Cita, di mana setiap elemen dirancang untuk saling mendukung. Data awal dari pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi UMKM lokal, yang pada gilirannya menciptakan siklus ekonomi positif di daerah-daerah tertinggal. Oleh karena itu, meskipun menghadapi kritik, MBG tetap menjadi benchmark penting untuk menilai efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun pertama.

Dari perspektif historis, kehadiran MBG juga dapat ditelusuri kembali ke berbagai upaya sebelumnya yang gagal mencapai skala nasional yang serupa. Pemerintahan sebelumnya telah mencoba intervensi gizi terbatas, tetapi kurangnya koordinasi antarlembaga sering kali menghambat keberlanjutan. Prabowo-Gibran membawa pendekatan baru dengan membentuk Badan Gizi Nasional sebagai koordinator tunggal, yang memastikan alokasi anggaran lebih efisien. Laporan Setkab 2025 juga menyoroti penghematan hingga Rp300 triliun dari optimalisasi dana, yang dialihkan langsung ke ekspansi program. Kritik UGM tentang kesiapan daerah memang valid, namun langkah remedial seperti pelatihan massal bagi operator SPPG telah menunjukkan perbaikan cepat. Dengan demikian, MBG bukan hanya program, tapi juga model tata kelola baru yang patut dipantau.

Secara ekonomi, efek MBG meluas ke rantai nilai pangan nasional, di mana petani lokal kini menjadi pemasok utama sayur, protein, dan karbohidrat. Hingga akhir 2025, proyeksi menunjukkan kontribusi Rp335 triliun untuk APBN 2026, dengan multiplier effect hingga 1:7 pada PDB desa. Kasus manipulasi beras di awal ditangani dengan transparansi, termasuk audit independen oleh BPK. Dukungan DPR untuk perluasan anggaran menandakan konsensus politik, meski oposisi tetap vokal soal prioritas. MBG dengan demikian menjadi katalisator transformasi agraria yang inklusif.

Tantangan logistik di hari pertama, seperti keterlambatan susu di beberapa provinsi, segera diatasi melalui impor sementara dan peningkatan produksi lokal. Data BGN mencatat peningkatan 70 persen asupan gizi di kelompok miskin, membuktikan dampak langsung pada kesejahteraan. Kolaborasi dengan Kementan dan Kemendes memastikan stok berkelanjutan, sementara monitoring digital via app nasional tingkatkan akuntabilitas. Kritik awal justru memperkaya program, mendorong revisi menu berbasis masukan masyarakat. MBG kini menjadi contoh adaptif governance di Indonesia.

Pada akhirnya, fenomena MBG di 100 hari pertama bukan hanya soal makanan, tapi narasi nasional tentang komitmen anti-stunting. Dengan 82,9 juta target, program ini menguji kapasitas negara dalam inklusi sosial-ekonomi. Prestasi 30 juta penerima hingga 2025 validasi strategi bertahap Prabowo. Meski kontroversi ada, MBG tetap pondasi SDM Emas 2045. Analisis mendalam diperlukan untuk pahami dinamikanya secara holistik..



Gambar 1. 1 Laporan Reuters Institute Digital News Report Indonesia 2025 kategori media online

Berdasarkan Laporan *Digital News Report 2025* yang diterbitkan oleh *Reuters Institute for the Study of Journalism* pada Februari 2025, Indonesia memiliki populasi sekitar 280 juta jiwa dengan penetrasi internet mencapai 69%. Laporan tersebut mencatat bahwa Tempo.co termasuk dalam sepuluh besar situs berita *online* yang paling sering dikunjungi di Indonesia, dengan 16% responden mengatakan mereka mengakses situs ini dalam satu minggu terakhir. Meskipun angka ini masih berada di bawah Detik.com (46%) dan Kompas.com (37%), hal ini menunjukkan posisi strategis Tempo.co sebagai salah satu media *online* nasional

yang berpengaruh di ranah digital.

Survei yang sama juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Tempo.co mencapai 53%, sementara 37% responden bersikap netral, dan hanya 10% yang menyatakan ketidakpercayaan. Angka ini membuat Tempo.co menempati posisi lebih tinggi dibandingkan media *online* lain seperti Suara.com (45%) dan Merdeka.com (48%), menandakan bahwa Tempo.co masih dipandang sebagai media dengan kredibilitas yang cukup kuat oleh publik.

Tempo yang dikenal sebagai media independen dan kritis terhadap pemerintah memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat. Gaya jurnalistiknya yang mendalam dan analitis, serta keberaniannya dalam membahas isu sensitif, menjadikan Tempo.co sebagai objek penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks konstruksi realitas media terhadap pemberitaan kebijakan pemerintah, termasuk pada 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran.

Sebagai media yang kritis dan mendalam, Tempo.co tidak hanya menyajikan analisis kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi saluran penting dalam memaparkan berbagai program strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis. Program ini, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia, mendapat sorotan signifikan dalam pemberitaan Tempo, mengingat peran vitalnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi syarat utama kemajuan dan kemandirian suatu bangsa. SDM berkualitas tidak hanya berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi dasar terciptanya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pembangunan SDM sebagai strategi nasional untuk mewujudkan visi Indonesia maju, mandiri, dan adil. Salah satu program utama yang dirancang untuk mendukung hal ini adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang melambangkan komitmen pemerintah dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyediakan makanan sehat dan bergizi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pemenuhan gizi yang baik sejak masa dini menjadi faktor penting dalam

membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal seperti petani, peternak, dan nelayan, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan begitu, program ini memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan gizi sangat relevan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan mencetak generasi emas yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Berdasarkan berbagai penelitian demografis, Indonesia diperkirakan akan memiliki populasi usia produktif yang besar pada tahun 2045. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan yang memerlukan kebijakan komprehensif untuk memastikan generasi muda tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Meski demikian, pembangunan SDM unggul di Indonesia masih menghadapi kendala serius, khususnya terkait gizi buruk dan stunting. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan prevalensi stunting mencapai 21,6%, meskipun tren ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan penurunan angka tersebut menjadi 14% pada 2024, tetapi pencapaian ini memerlukan upaya yang lebih sistematis dan masif. Selain itu, sekitar 3,8% anak balita di Indonesia mengalami gizi buruk, yang berpengaruh langsung pada perkembangan kognitif, fisik, dan kemampuan belajar mereka, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas generasi mendatang.

Menghadapi tantangan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi konkrit agar setiap anak memperoleh akses makanan sehat dan bergizi. Program ini diterapkan di sekolah dasar dan menengah dengan melibatkan penyedia makanan lokal agar selain memenuhi standar gizi Kementerian Kesehatan, juga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan demikian, program ini menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha kecil, dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Secara internasional, kebijakan penyediaan makanan bergizi gratis diakui sebagai strategi efektif dalam pembangunan SDM. Laporan *World Food Programme (WFP) The State of School Feeding Worldwide 2022* menyebutkan

banyak negara yang mengadopsi program serupa, seperti di Eropa-Asia Tengah (53 negara), Afrika Sub-Sahara (44 negara), Amerika Latin-Karibia (37 negara), dan Asia Timur-Pasifik (32 negara). Contoh keberhasilan terlihat pada program Bolsa Familia di Brasil yang menurunkan angka stunting dari 19,5% tahun 2000 menjadi 7% tahun 2019, serta School Lunch Program di Jepang yang sejak 1947 berperan mengurangi stunting hingga 2,1%. Keberhasilan ini membuktikan bahwa intervensi gizi lewat program makan bergizi gratis berdampak signifikan pada kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi.

Program Makan Bergizi Gratis yang sebelumnya ingin diterapkan di Indonesia pada 2 Januari 2025 menjadi sebuah langkah penting dalam membangun fondasi SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Pada saat itu, dengan target 19,47 juta penerima manfaat dan dukungan anggaran sekitar Rp71 triliun sampai akhir 2025, dan program ini diharapkan berjalan lancar dan memberikan hasil nyata. Keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan masyarakat. Sinergi antar pihak menjadi kunci bagi terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif sebagai investasi masa depan bangsa. (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024).



*Gambar 1. 2 Kepala BGN Pastikan Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis ke Seluruh Indonesia.*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai dijalankan sejak 6 Januari 2025 untuk

meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, program ini dilaksanakan di 190 titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi. Program ini menyoar kelompok rentan seperti balita, siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui, dengan tujuan meningkatkan asupan gizi seimbang sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (Tempo.co, 2025).

Pelaksanaan program MBG juga dirancang untuk menjamin pemerataan layanan gizi hingga ke pelosok daerah. Pemerintah berupaya agar manfaat program tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga dirasakan secara adil oleh masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemerataan pelaksanaan program MBG merupakan fokus utama pemerintah. Ia menyatakan:

“Saat ini pemerintah baru menetapkan 190 titik dapur program Makan Bergizi Gratis yang tersebar di 26 provinsi. Pemerataan akan terus dilakukan agar seluruh daerah mendapatkan manfaat program ini secara adil.”

Selain itu, implementasi program MBG turut melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pelaku UMKM, serta koperasi lokal. Keterlibatan mereka diharapkan dapat memperkuat rantai pasok bahan pangan bergizi, sehingga program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di daerah (Tempo.co, 2025).

Menurut Burhan Bungin (2008), konstruksi sosial media massa meliputi beberapa tahapan utama. Pertama, penyiapan materi konstruksi yang dilakukan oleh redaksi media, dimana media menentukan isi dan perspektif pemberitaan berdasarkan keberpihakan yang bisa jadi kepada kapitalisme, kepentingan umum, maupun sekadar keberpihakan semu kepada masyarakat. Tahap kedua adalah sebaran konstruksi, yaitu proses distribusi informasi ke publik berdasarkan agenda media yang menentukan mana fakta dan isu yang diprioritaskan untuk jadi perhatian utama pembaca. Di tahap ketiga terjadi pembentukan konstruksi realitas di masyarakat berupa tiga tahap yakni: konstruksi membenaran (media menjadi otoritas dalam membenarkan kebenaran sebuah peristiwa), kesediaan publik untuk dikonstruksi (audiens memilih untuk menerima dan memahami informasi yang

dibangun media), dan konsumsi media sebagai kebiasaan rutin yang membentuk persepsi dan sikap. Terakhir adalah tahap konfirmasi di mana masyarakat memberikan respons dan menerima makna yang tersampaikan sehingga konstruksi sosial tadi menjadi bagian dari kesepakatan sosial.

Dalam penelitian ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus analisis yang menarik karena mewakili kebijakan strategis pemerintah yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Program ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggulan sebagai dasar pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Pemberitaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kompas.com dan Detik.com pada periode 21 Oktober 2024 hingga 21 Januari 2025 menghasilkan total 193 artikel, dengan distribusi seimbang yakni 96 artikel di Kompas.com dan 97 artikel di Detik.com. Jumlah berita mengalami peningkatan signifikan secara bulanan, mulai dari 29 artikel (15,03%) pada Oktober, 38 artikel (19,69%) pada November, 41 artikel (21,24%) pada Desember, hingga melonjak menjadi 85 artikel (44,04%) pada Januari 2025 yang bertepatan dengan fase awal implementasi program di 190 titik dapur pada 26 provinsi. Dominasi Detik.com pada dua bulan pertama dan Kompas.com pada Januari mencerminkan variasi intensitas liputan yang dipengaruhi dinamika publik dan peluncuran kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Penelusuran manual peneliti di Tempo.co dengan kata kunci “Makan Bergizi Gratis” pada periode yang sama menemukan 589 artikel, menunjukkan eksposur tinggi yang mengindikasikan MBG sebagai isu dominan dalam 100 hari pertama pemerintahan. Program ini didukung anggaran awal Rp71 triliun untuk menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat hingga 2029, dengan tahap pertama melibatkan 3 juta anak harian mulai 6 Januari 2025, melalui penyesuaian anggaran kementerian dan tambahan hingga Rp100 triliun oleh Badan Gizi Nasional. Data dan informasi tersebut diperoleh dari laporan Tempo.co yang memaparkan secara detail mengenai alokasi anggaran serta perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kesiapan pelaksanaan program MBG di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, tercermin dari laporan bahwa sejumlah anak di beberapa daerah

belum memperoleh manfaat program sejak peluncurannya. Selain itu, muncul berbagai kritik terkait logistik dan kelengkapan menu, termasuk ketersediaan susu yang belum merata di beberapa lokasi. Pada hari pertama pelaksanaan, estimasi penerima manfaat berkisar antara 570.000 hingga 665.000 orang, namun distribusi yang belum merata menunjukkan adanya tantangan dalam kesiapan infrastruktur dan koordinasi antar daerah (Kompas TV, 2024).

Di sisi lain, kontroversi terkait pendanaan dan kesiapan daerah dalam mendukung program juga berkembang. Kritik datang dari DPR dan sejumlah ahli, termasuk akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menilai perencanaan serta pelaksanaan program MBG masih kurang jelas (UGM, 2024). Selain itu, pemantauan percakapan digital oleh Drone Emprit mengungkapkan sentimen negatif yang cukup tinggi terhadap isu MBG, mencapai sekitar 50 persen, terutama terkait alokasi anggaran dan ketidaksiapan daerah dalam pelaksanaannya (IDN Times, 2024).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menganalisis konstruksi realitas media terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran yang diimplementasikan di 100 hari pertama pemerintahan (20 Oktober 2024–28 Januari 2025) dengan 190 SPPG di 26 provinsi, anggaran Rp71–100 triliun, dan target 82,9 juta penerima hingga 2029. Meskipun studi framing kebijakan publik melimpah, seperti Jurnal Komunikasi (2024) tentang UU IKN, penelitian PSBB di Harian Tempo pakai Rita Adi Sebelas Wedan, Jurnal Komunikasi Digital (2025) frame MBG di Kompas.com, serta Jurnal Ilmu Sosial (2026) evaluasi umum MBG, belum ada kajian khusus konstruksi realitas pemberitaan MBG di Tempo.co, yang mendominasi dengan 589 artikel (vs 96 Kompas.com, 97 Detik.com). Celah ini krusial karena periode simbolis awal kabinet bentuk legitimasi publik, sementara studi Tempo.co sebelumnya (misalnya bencana) hanya parsial framing tanpa Berger-Luckmann penuh; saya pilih topik ini untuk ungkap eksternalisasi (judul kritis), objektivasi (isi evaluatif), internalisasi (pengawasan sosial) terhadap MBG yang ambisius tapi kontroversial (kritik DPR/UGM, sentimen negatif 50%).

Pemilihan Tempo.co didasari reputasinya investigatif (kepercayaan 53% per Reuters 2025, sejarah pembredelan 1982/1994), narasi kritis beda media lain (evaluasi Depok, pemerataan BGN), dan data primer 589 artikel yang jadi pionir

analisis empiris, delapan studi terdahulu nihil fokus MBG-Tempo.co. Tanpa penelitian ini, literatur komunikasi Indonesia terbatas paham kontrol sosial media digital (penetrasi internet 69%) terhadap kebijakan gizi-ekonomi seperti MBG (stunting 21,6%, 1,5 juta lapangan kerja); kontribusi teoritis integrasi Berger-Luckmann-Entman, praktis dorong jurnalisme kebijakan, dan relevan historis era Prabowo untuk studi lanjutan..

## **1.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada analisis pemberitaan mengenai kebijakan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimuat di portal berita Tempo.co. Fokus penelitian diarahkan secara khusus pada pemberitaan terkait isu Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program kebijakan pemerintah. Rentang waktu yang dijadikan batas penelitian adalah mulai dari tanggal 21 Oktober 2024 hingga 21 Januari 2025, yang merepresentasikan periode seratus hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan demikian, penelitian ini tidak mencakup pemberitaan di luar isu MBG maupun di luar batas waktu yang telah ditentukan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Bagaimana konstruksi realitas pemberitaan Makan Bergizi Gratis di Tempo.co?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengenathui Konstruksi realitas pemberitaan Program Makan Bergizi Gratis di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo–Gibran padaTempo.co

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Terdapat manfaat pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Memperkuat pemahaman tentang Teori Konstruksi dapat diaplikasikan dalam analisis pemberitaan media online dalam membangun konstruksi realitas sosial melalui pemilihan sudut pandang tertentu dalam pemberitaan kebijakan publik. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam studi media massa dan komunikasi politik dengan menonjolkan proses seleksi, penonjolan isu, dan mekanisme pemberian makna oleh media yang mempengaruhi persepsi public.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi media,

khususnya Tempo.co, dalam merefleksikan bagaimana pemberitaan yang mereka bangun berdampak pada persepsi masyarakat. Temuan ini dapat membantu media untuk meningkatkan kualitas pemberitaan agar lebih akurat, berimbang, dan bertanggung jawab dalam membentuk opini publik. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan yang diluncurkan diterima dan dikonstruksi di ruang publik lewat media, sehingga dapat dijadikan masukan untuk strategi komunikasi publik yang lebih efektif.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pemilihan topik konstruksi pemberitaan kebijakan pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama di Tempo.co. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan skripsi. Di dalamnya terdapat konteks kebijakan 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran serta alasan memilih Tempo.co sebagai objek studi.

### **BAB 2 TINJAUAN TEORI**

Membahas teori dan konsep utama yang digunakan sebagai dasar analisis, termasuk teori konstruksi realitas sosial oleh Berger dan Luckmann, serta kajian media dan jurnalisme kritis. Selain itu, terdapat ulasan penelitian terdahulu yang relevan dan perbandingan hasilnya dengan penelitian ini, lengkap dengan kerangka berpikir penelitian.

### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Menjelaskan pendekatan kualitatif yang digunakan dengan metode analisis isi. Memuat paradigma penelitian, jenis dan pendekatan, objek dan subjek, unit analisis, teknik pengumpulan dan analisis data (dokumentasi berita Tempo.co), serta validitas data dan rincian lokasi serta waktu penelitian.

### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana Tempo.co mengonstruksi realitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Bab ini menguraikan pola pemilihan isu, penonjolan aspek tertentu, penggunaan narasi kritis, serta

kecenderungan sikap redaksi dalam membingkai kebijakan MBG sehingga membentuk persepsi publik bahwa program tersebut merupakan kebijakan strategis yang kompleks dan memerlukan pengawasan.

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dan saran yang merangkum temuan utama penelitian terkait konstruksi realitas pemberitaan MBG di Tempo.co, termasuk implikasinya terhadap pembentukan opini publik. Selain itu, bab ini memuat saran praktis bagi media dalam menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan, saran bagi pemerintah dalam strategi komunikasi kebijakan, serta saran akademis untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam kajian komunikasi politik dan studi media.

